



## Pembukaan XT Square tunggu Lebaran

Oleh Anggraenny Prajayanti  
 HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Operasional XT Square dipastikan tidak sesuai jadwal. Jika sebelumnya peresmian dijadwalkan dan mulai operasional pertengahan Juli, kini dipastikan mundur sampai setelah Lebaran mendatang.

Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi yang tidak memungkinkan jika dipaksakan dibuka sesuai rencana.

"Kalau melihat kondisi sekarang sepertinya lebih baik diundur sampai setelah Lebaran saja. Sekitar September," kata Walikota Jogja, Herry Zudianto di ruang kerjanya, Senin (23/5).

Jika dipaksakan dibuka pertengahan Juli dikhawatirkan akan kurang baik juga karena setelah peresmian langsung berhadapan dengan bulan puasa. Menurut Herry sangat disayangkan XT Square nanti baru diresmikan justru terlihat sepi pengunjung di bulan puasa.

Selain alasan waktu, pengunduran jadwal ini disebabkan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Satu di antaranya belum disahkan Perda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset. Perda ini menjadi

| TAHAP XT SQUARE  |  |
|--|--|
| <p><b>Tahap pertama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembangunan <i>basement</i> untuk parkir kapasitas: 500 roda dua, 150 roda empat dan bus</li> </ul> <p><b>Tahap kedua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembangunan stan untuk kerajinan</li> </ul> <p><b>Tahap ketiga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penyelesaian gedung zona nusantara, kuliner indoor, lanskap, mechanical electrical (listrik)</li> <li>▶ Anggaran Rp145 miliar</li> </ul> | <p><b>Target awal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ pemasaran : Februari 2011</li> <li>▶ Pembukaan : Juli 2011</li> </ul> <p><b>Realisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hingga Mei 2011 pembasan raperda belum selesai.</li> <li>▶ Belum ada raperda, direksi dan manajemen belum bisa bekerja</li> <li>▶ Target pembukaan berikut : September atau setelah Lebaran</li> </ul> <p><small>DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER</small></p> |

payung hukum bekerjanya direksi dan manajemen, di antaranya untuk penggajian karyawan. Di awal, Pemkot Jogja mengira cukup hanya Perda BUMD kemudian teknisnya diatur melalui Perwal. Namun Pemprov DIY menghendaki Perda Penyertaan Modal dan Pemisahan Aset tetap harus ada. Perda ini sendiri sampai sekarang masih dalam an-trean pembahasan raperda di luar prolegda di DPRD Kota Jogja.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jogja Ardianto menyatakan untuk

nama direksi yang diajukan memang sudah masuk suratnya. "Ada tiga nama yang dimintakan pertimbangan. Komisi B sudah mendapat tembusannya dan akan kami bahas secara khusus Kamis (26/5) besok," kata Ard.

Pembahasan tersebut perlu dilakukan karena dalam surat dari Pemkot tidak disebutkan latar belakang riwayat hidup serta prestasi kerja mereka. Sesuai perda yang memiliki kewenangan untuk memilih adalah Pemkot. Dewan hanya akan dimintai pertimbangan.

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum                   | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset |              |        |                 |
| 3. Badan Perencanaan Pembangunan  |              |        |                 |

Yogyakarta, 27 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005